

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KELURAHAN KRANGGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	5
BAB III	7
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	7
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	7
Pendapatan - LRA	7
Belanja	7
Pendapatan - LO	8
Beban	8
Aset	8
Kewajiban	10
Ekuitas Dana	10
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	11
BAB IV	12
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	12
BAB V	14
PENUTUP	14

BAB I PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kelurahan Kranggan sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pada bab ini akan disajikan pembahasan dan analisa tentang keuangan sebagai aspek penunjang dari pencapaian kinerja kegiatan, sebagaimana telah diuraikan diatas.

Secara terperinci untuk Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung hanya menyajikan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah saja sesuai dengan keadaan yang dilaksanakan oleh SKPD Kelurahan sebagai Berikut :

Tabel
Ringkasan Perubahan APBD Kelurahan Kranggan
Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp.		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	0	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	0	0	
5	BELANJA DAERAH	994.740.000	1.097.139.508	102.399.508	
5.1	BELANJA OPERASI	994.740.000	1.097.139.508	102.399.508	
5101	Belanja Pegawai	5.880.000	4.502.036	(1.377.964)	
5102	Belanja Barang dan Jasa	988.860.000	1.092.637.472	103.777.472	
52	BELANJA MODAL	0	0	0	
	JUMLAH BELANJA	994.740.000	1.097.139.508	102.399.508	
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(994.740.000)	(1.097.139.508)	(102.399.508)	

Adapun ikhtisar pencapaian target keuangan yang merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana tertuang dalam APBD dengan realisasinya, ditampilkan dalam Tabel sebagai berikut:

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
5	BELANJA DAERAH	1.097.139.508	1.066.127.674	96,84	1.126.812.346
51	BELANJA OPERASI	1.097.139.508	1.066.127.674	96,84	1.126.812.346
5101	Belanja Pegawai	4.502.036	3.600.000	79,96	3.736.500
5102	Belanja Barang dan Jasa	1.092.637.472	1.062.527.674	97,24	1.123.075.846
52	BELANJA MODAL	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA	1.097.139.508	1.066.127.674	96,84	1.126.812.346
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(1.097.139.508)	(1.066.127.674)	(96,84)	1.126.812.346

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

- a. Adanya refocusing, dikarenakan tenggat waktu yang singkat untuk pemangkasan anggaran kami harus memilah kegiatan mana yang harus di pangkas maupun tidak sehingga pencapaian target sulit terpenuhi.
- b. Dikembalikannya beberapa anggaran setelah di refocusing di akhir tahun, menjadikan susah untuk menyesuaikan waktu dan persiapan kegiatan yang muncul kembali dan belum dilaksanakan, sehingga target tidak sepenuhnya tercapai 100%.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Tahun 2023 APBD pada Kelurahan Kranggan tidak ada penetapan target pendapatan (nihil).

3.1.2. Belanja

Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai.

Tahun Anggaran 2023

Belanja Operasi	Anggaran	Realisasi	%
a. Belanja Pegawai	4.502.036	3.600.000	79,96
b. Belanja Barang dan Jasa	1.092.637.472	1.062.527.674	97,24

Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp. 3.600.000 atau 79,96% dari Anggaran sebesar Rp. 4.502.036

Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp. 1.062.527.674 atau 97,24% dari Anggaran sebesar Rp. 1.092.637.472

Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 sebesar Rp. 0 atau 0 % dari Anggaran sebesar Rp. 0,-

3.1.3. Pendapatan - LO

—NIHIL—

3.1.4. Beban

Kode Rekening	Uraian	2023
8	Beban Daerah	1.113.567.818,53
81	Beban Operasi	1.113.567.818,53
8101	Beban Pegawai	3.600.000,00
8102	Beban barang dan Jasa	1.062.299.242,00
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	47.668.576,53
Jumlah Beban		1.113.567.818,53

Beban daerah tahun 2023 terdiri dari beban operasi sebesar Rp. 1.113.567.818,53. Beban operasi terdiri dari beban pegawai sebesar Rp. 3.600.000,00, beban barang dan jasa sebesar Rp. 1.062.299.242,00, beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp. 47.668.576,53.

3.1.5. Aset

1. Kas dan Setara Kas

Rekening	2023	2022
1101	0	0

Saldo Kas dan setara Kas sebesar Rp. 0 terdiri dari uang dan rekening giro Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.0, dana yang masih berada di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 0.

a. Kas di Bank

Saldo Kas di Bank dalam bentuk Rekening Giro Bendahara Pengeluaran dengan saldo per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa – sisa Kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran SKPD per tanggal 31

Desember 2023 yang merupakan pajak belum disetor nihil.

c. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,-

2. Piutang

Per 31 Desember 2023

Saldo Piutang lain-lain Tahun Anggaran 2023 di Kelurahan Kranggan NIHIL.

3. Persediaan

Rekening	2023	2022
Barang Pakai Habis	130.000	2.500

Saldo persediaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 2.500 dan Rp. 130.000 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

a. Kertas Cover Rp. 130.000

4. Investasi Jangka Panjang

- NIHIL -

5. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo aset tetap per tanggal 31 Desember 2023 tersaji sebagai berikut :

Rekening	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
Tanah	2.971.890.135,00		117.709.767,00	2.854.180.368,00
Peralatan dan Mesin	266.500.000,00			266.500.000,00
Godung dan Bangunan	1.728.508.160,00			1.728.508.160,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.492.260.000,00			1.492.260.000,00
Aset Tetap Lainnya	66.500,00			66.500,00
Akumulasi Penyusutan	(2.716.314.694,12)	(47.668.576,53)		(2.763.983.270,65)
Jumlah	3.742.910.100,88	(47.668.576,53)	117.709.767,00	3.577.531.757,35

Saldo awal Aset Tetap sebesar Rp. 3.742.910.100,88, selama Tahun 2023 terdapat pengurangan tanah yang mutasi ke DPRKPLH sebesar Rp.117.709.767 dan penambahan beban penyusutan aset sebesar Rp. 47.668.576,53 sehingga Saldo

akhir Aset Tetap Tahun Anggaran 2023 per tanggal 31 Desember 2023 Aset Tetap di Kelurahan Kranggan sebesar Rp. 3.577.531.757,35.

3.1.6. Kewajiban

Rekening	2023	2022
Kewajiban Jangka Pendek	8.057.681	8.158.613

Sampai dengan 31 Desember 2023 di Kelurahan Kranggan kewajiban jangka pendek sejumlah Rp. 8.057.681 dengan rincian sebagai berikut :

1. Utang belanja honor pegawai honorer bulan Desember 2023 : 7.550.000
2. Utang belanja rekening telepon bulan Desember 2023 : 47.400
3. Utang belanja rekening air bulan Desember 2023 : 22.900
4. Utang belanja rekening listrik bulan Desember 2023 : 437.381

Jumlah : 8.057.681

3.1.7. Ekuitas Dana

KETERANGAN	JUMLAH
Ekuitas Awal	3.734.753.987,88
Surplus / (Defisit) LO	-1.113.567.818,53
Koreksi Kesalahan	93.957.941,00
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	854.459.966,00
Ekuitas Akhir	3.569.604.076,35

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD.

Data berikut menyajikan tentang perbandingan antara LRA dan LO pos jasa kantor pada tahun 2023.

LRA		LO		SELISIH
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.000.000	Beban Jasa Tenaga Administrasi	48.000.000	0
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	21.300.000	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	21.600.000	300.000
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	20.750.000	Beban Jasa Tenaga Keamanan	21.000.000	250.000
Belanja Tagihan Telepon	568.800	Beban Tagihan Telepon	568.800	
Belanja Tagihan Air	981.750	Beban Tagihan Air	276.650	705.100
Belanja Tagihan Listrik	4.597.241	Beban Tagihan Listrik	4.651.409	54.168

Pada pos Jasa Tenaga Administrasi tidak ada selisih antara LRA dan LO. Di pos Jasa Tenaga Kebersihan ada selisih sebesar Rp. 300.000 karena ada penambahan honor diawal tahun 2023, sehingga ada selisih di utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp. 1.775.000 dan Rp. 1.800.000. Begitu juga di pos Jasa Tenaga Keamanan ada selisih sebesar Rp. 250.000 karena ada penambahan honor diawal tahun 2023, sehingga ada selisih di utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp. 1.730.000 dan Rp. 1.750.000. Pada pos Tagihan Telepon tidak ada selisih antara LRA dan LO Hal tersebut karena jumlah utang awal dan utang akhir pos tersebut sama, yaitu sebesar Rp. 47.400. Pada pos Tagihan Air ada selisih sebesar Rp. 705.100,- hal tersebut karena adanya kekurangan belanja yang belum terbayar di tahun 2022. pada pos Tagihan Listrik ada selisih sebesar Rp. 54.168 karena adanya perbedaan antara utang awal dan utang akhir.

BAB IV

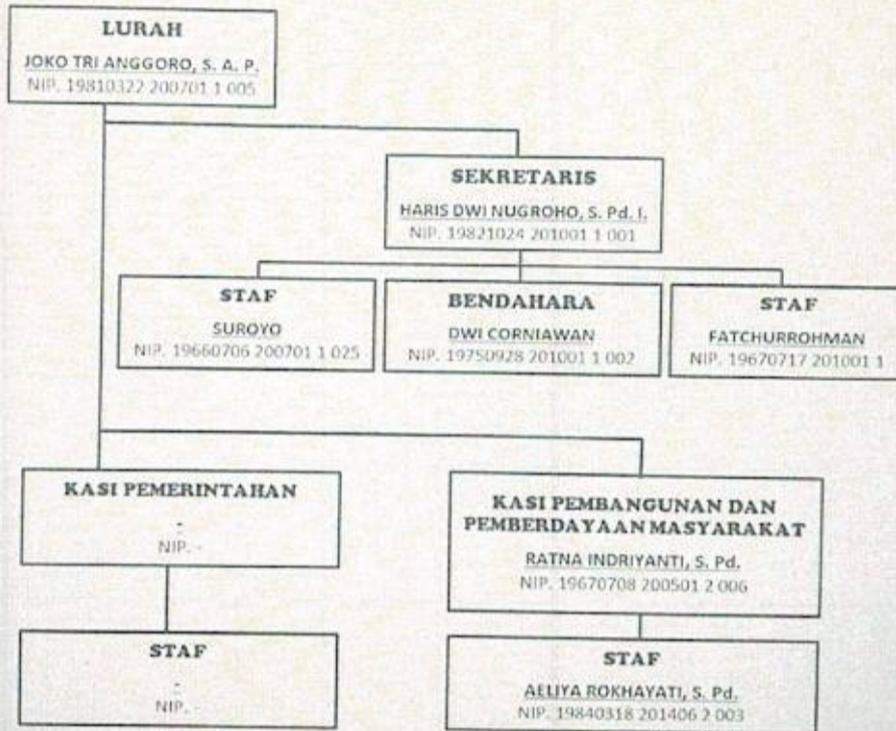
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Kelurahan Kranggan merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kecamatan Kranggan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung pasal 4, dalam wilayah kecamatan Kranggan dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi kecamatan di Kabupaten Temanggung, Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan. Lurah adalah Kepala wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:

1. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pelayanan masyarakat;
4. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum di lingkungan kelurahan;
5. pelaksanaan dan pengelolaan dana alokasi kelurahan; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

KEDUDUKAN SUSUNAN DAN DATA KERJA ORGANISASI
KELURAHAN KRANGGAN
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023



BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip taat pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. prinsip-prinsip dimaksud meliputi : partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, efektifitas dan profesionalisme.

Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun 2023 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas, namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Kranggan, 06 Februari 2024

LURAH KRANGGAN

The image shows a circular official stamp of the Government of Kranggan District. The text around the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN KRANGGAN" at the top and "Kecamatan Kranggan" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "JOKO TRI ANGGORO, S.A.P" and the NIP number "NIP. 19810322 200701 1 005" are printed.

JOKO TRI ANGGORO, S.A.P
NIP. 19810322 200701 1 005